

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Pada awal 2013, mencuat isu konflik yang didahului oleh Kesultanan Sulu yang ingin mengklaim Sabah sebagai wilayah kekuasaannya. Aksi tersebut didasarkan pada catatan sejarah masa lampau yang dijadikan pedoman oleh Kesultanan Sulu untuk menginvasi wilayah Sabah dari Malaysia. Dari pihak Pemerintah Malaysia sendiri langsung memberikan respon dengan mengecam aksi klaim sepihak yang dilakukan Sultan Sulu Jamalul Kiram III. Malaysia sebagai Negara yang berdaulat tentunya berkewajiban menjaga wilayahnya sesuai konstitusi.

Dari beberapa sumber berita menyebutkan bahwa ada kesalahpahaman dalam intern Pemerintahan Filipina. Ada sepucuk surat penting yang ditujukan untuk pihak pemerintah, surat itu ditulis Agbimuddin Kiram untuk Benigno Aquino usai terpilih presiden 2010 silam. Isi surat itu, pertama, ucapan selamat atas kemenangan Aquino. Kedua, intinya mendesak pemerintah Filipina mendukung klaim mereka atas Sabah. Sulu juga minta diikutsertakan dalam perundingan damai antara pemerintah dengan Front Pembebasan Islam Moro (MILF). Saat surat itu dikirim, Kesultanan Sulu mempunyai harapan tinggi. Setidaknya, pemerintahan Aquino bisa memberikan perhatian atas aspirasi mereka

Yang menjadi persoalan adalah selama lima tahun di bawah pemerintah Gloria Macapagal Arroyo, tuntutan Sulu atas Sabah diabaikan. Kini di bawah Aquino, pihak Kesultanan Sulu mengira angin berbeda akan bertiup. Tapi inilah yang membuat Sulu kecewa. Surat itu seperti hilang entah kemana dan tidak ada yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Klaim atas Sabah itu kembali diacuhkan. Mereka bahkan tak diikutkan dalam perundingan dengan MILF terkait nasib Mindanao. Sampai kedua kubu berdamai, dan menghasilkan daerah otonomi Bangsamoro, Kesultanan Sulu tidak dapat andil dalam peta perpolitikan Filipina.¹

Mungkin pihak Kesultanan Sulu merasa sakit hati atau semacamnya, merasa kecewa atas hilangnya atau tidak tersampainya surat itu kepada Presiden Filipina. Kemudian para pejuang Tentara Pembebasan Sabah (Sabah Liberation Army-SLA) yang dipimpin oleh seorang pewaris Sultan Sulu, Radja Mudah Agbimuddin Kiram dan 200 pengikutnya melakukan pelayaran dari Filipina ke daerah pesisir di Malaysia pada tanggal 12 Februari 2013 dan dalam rangka menghidupkan kembali sengketa, para pejuang Sulu itu kemudian menyusup masuk ke wilayah Lahad Datu di Sabah. Mereka menerobos lewat jalur laut dari Tawi-tawi, menduduki desa Tanduo dibawah pimpinan Radja Muda Agbimuddin Kiram.

Masalah perbatasan wilayah di Sabah memang selalu membayangi bayangi hubungan Filipina-Malaysia. Karena di daerah tersebut memang rawan konflik perbatasan, yang disebabkan dampak dari imperealisme masa lampau. Dalam kepemilikan Sabah Kesultanan Sulu merasa memiliki “hak” untuk mengklaim wilayah Sabah, mereka mengacu pada satu perjanjian penting pada 22 Januari 1878², perjanjian tersebut membahas tentang serah terima untuk penyewaan wilayah Sabah antara kesultanan Sulu dan Baron De Overbeck seorang saudagar berkebangsaan Austria. Sebenarnya Sabah dulunya merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Brunei. Akan tetapi Sultan Sulu beranggapan bahwa wilayah Sabah telah dihibahkan oleh Sultan Brunei Abdul Mommin, sebagai balas jasa karena telah membantu Sultan Abdul Mommin dalam perang Saudara di Pulau Chermin.

Malaysia menyatakan Sabah resmi menjadi bagian Malaysia karena telah melalui sebuah referendum pada tahun 1962-1963³. Pada tahun 1962, Presiden Filipina saat itu, Diosdado Macapagal, secara resmi mengajukan klaim atas Sabah, berdasarkan klaim para ahli waris Kesultanan Sulu atas wilayah tersebut. Situasi semakin diperumit dengan pengambilalihan kontrak

² Yang menjadi persoalan adalah pada 27 Desember 1877 juga diadakan perjanjian antara Sultan Brunei dan Baron De Overbeck. Tentang pengangkatan Baron De Overbeck sebagai Maharaja Sabah, Gayo dan Sandakan. Dan memberikan hak istimewa untuk pengelolaan wilayah Sabah. Mungkin disini titik persoalannya, ada ambiguitas yang terjadi atas kepemilikan Negeri sabah sehingga menimbulkan banyak persepsi dan memicu sengketa wilayah.

³ Prayitno Ramelan, <http://hankam.kompasiana.com/2013/03/15/dampak-politis-kemelut-sabah-bagi-malaysia-542940.html>. diakses pada Senin 20 Mei 2013.

British North Borneo Co tahun 1878 oleh Federasi Malaysia pada tahun 1963.⁴

Dilihat dari sikap dan perilaku konflik antara Malaysia dengan tentara Kesultanan Sulu, menunjukkan sikap yang keras dan bertahan. Pihak Malaysia menyatakan bahwa mereka tidak akan melepaskan Sabah ke tangan Sulu, bahkan Malaysia akan menambah jumlah pasukan untuk mempertahankan Sabah. Sedangkan Sulu bertekad akan terus melancarkan serangan hingga Sabah berhasil diduduki. Abraham Idjirani, juru bicara Sultan Sultan Sulu Jamalul Kiram III, menegaskan tentara Kesultanan Sulu tak akan menyerah dan akan bertahan sampai titik darah penghabisan. Sikap yang keras dan bertahan hingga situasi jelas siapa yang menang dan kalah ini, menunjukkan konflik Malaysia dan Sulu ini semakin bereskalasi.

Presiden Filipina Benigno Aquino, melalui konferensi pers menyampaikan kepedulian atas keamanan Filipina, Benigno juga meminta pasukan Sulu pulang ke Filipina dan menyelesaikan masalah dengan cara perundingan. Sedangkan Sulu yang menuntut Malaysia atas klaim Sabah, tidak menentang kekuasaan pemerintahan sah Filipina. Selain itu Filipina harus menjaga hubungan baiknya dengan Malaysia, oleh sebab itu Benigno Aquino mengajak pasukan Sulu untuk mundur dan merundingkan tuntutan itu. Oleh sebab itulah masalah Sulu harus ditangani dengan hati-hati oleh

⁴ *Op. cit.* Denny Armandanu.

pemerintahan Filipina, supaya tidak terjadi lagi kekacauan di internal Filipina itu sendiri.⁵

Situasi konflik masih berlanjut hingga pertengahan bulan Maret 2013, bahkan telah terjadi baku tembak antara kedua belah pihak sehingga menewaskan puluhan korban yang terdiri dari tentara Malaysia dan gerilyawan atau utusan dari pemimpin Kesultanan Sulu, Jamalul Kiram III. Polisi Diraja Malaysia dan pasukan militer Malaysia juga diturunkan di lokasi-lokasi yang diperkirakan kantong persembunyian pejuang dari Kesultanan Sulu.

Pada tanggal 1 Maret 2013 pasukan keamanan Malaysia menggelar sebuah operasi Militer yang diberi nama “Operasi Daulat” (Ops Daulat) guna mengamankan wilayah Sabah dari invasi para Pejuang Kesultanan Sulu. Ahmad Zahid Hamidi selaku Menteri Pertahanan Malaysia segera memberi mandat untuk menurunkan sedikitnya 2500 pasukan militer dan Polisi diraja Malaysia untuk menumpas para pejuang Kesultanan Sulu yang menduduki Sabah, khususnya di wilayah Lahad Datu dan Samporna yang ditengarai sebagai tempat persembunyian pejuang Sulu.

Upaya damai sudah ditawarkan Pemerintah Malaysia, agar pejuang Sulu kembali ke daerahnya dan meninggalkan Sabah. Akan tetapi pejuang Sulu dibawah pimpinan Agbimudin Kiram, tetap pada pendirian awalnya

⁵ Dikutip dari jurnal online, sumber <http://hi.umy.ac.id/malaysia-vs-kesultanan-sulu-tipe-konflik-unik->

merebut kembali hak mereka atas wilayah Sabah dan tidak bersedia untuk mundur. Akibatnya militer dibantu Polisi Diraja Malaysia menambah pasukan dan alat perang mereka seperti Tank Baja, Halicopter, Pesawat Tempur, senjata lengkap dll. Sesuai dengan komando dari Menteri Pertahanan Malaysia Ahmad Zahid Hamidi dan Perdana Menteri Najib Razak.

Disisi lain Pemerintah Filipina merasa bertanggung jawab penuh atas insiden tersebut, karena Kesultanan Sulu merupakan wilayah kekuasaan Filipina. Selain itu 800.000 warga Filipina juga berada di Sabah. Pemerintah Filipina juga berupaya menjaga hubungan Diplomatik dengan Malaysia, karena demi keselamatan warga-warganya juga yang berada di Sabah. Presiden Filipina, Benigno Aquino, ingin konflik Sabah diselesaikan secara damai lewat negosiasi. Aquino berpendapat, negosiasi merupakan cara efektif yang dapat dilakukan saat ini daripada saling melancarkan baku tembak. Diperkuat dengan argumen Menteri Dalam Negeri Filipina, Manuel Roxas, menyatakan sepakat untuk menggelar negosiasi dengan Malaysia. Roxas mengatakan, diplomasi agresif merupakan satu-satunya opsi yang memungkinkan diambil oleh pemerintah Filipina.⁶

Setelah melihat secara sekilas uraian diatas, maka dapat dilihat adanya eskalasi konflik antar keduanya dan belum menemui titik terang. Aktor yang terlibat dalam perkara ini cukup kompleks, mulai dari pihak Kesultanan Sulu

⁶ Anggi Kusumadewi, Santi Dewi : <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/398463-presiden-filipina-aiak-malaysia-negosiasi-konflik-sabah> diakses pada 20 Mei 2012

sendiri, Pemerintah Malaysia, dan juga Pemerintah Filipina yang merupakan Negara yang membawahi dan bertanggung jawab atas Kesultanan Sulu, ada juga kelompok-kelompok yang ditengarai terlibat dalam konflik tersebut seperti MNLF yang merupakan kelompok separatis asal Mindanao yang kemudian banyak yang bermukim di wilayah Sulu.

Oleh karena itu konflik antara Kesultanan Sulu dan Malaysia sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut. Konflik ini sangat unik, karena jarang sekali terjadinya konflik antara sebuah Negara (nation-state) berhadapan dengan sebuah Kesultanan dalam hal perebutan wilayah kedaulatan. Dan tentunya hal tersebut mengancam keamanan nasional Malaysia, karena wilayah Sabah sangat berharga sekali untuk Malaysia, karena Sumberdaya yang melimpah.

B. Rumusan permasalahan

Dari uraian latar belakang diatas dapat diambil pokok permasalahan, yaitu : **Bagaimana Respon Pemerintah Malaysia Terhadap Aksi Klaim Wilayah Sabah Oleh Kesultanan Sulu?**

C. Tujuan penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya :

1. Untuk memahami bagaimana eskalasi konflik yang terjadi di

2. Mengetahui akar permasalahan yang terjadi, yang melatarbelakangi klaim wilayah Sabah oleh Kesultanan Sulu.
3. Mengetahui respon Malaysia setelah wilayahnya di klaim Kesultanan Sulu.

D. Metode penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode eksplanatif, yaitu dengan cara memaparkan berbagai fakta-fakta empirik melalui data-data yang valid, sehingga dapat membuktikan kebenaran dari dugaan sementara yang diungkapkan penulis. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data-data sekunder yaitu melalui studi pustaka, dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam karya ilmiah ini, seperti buku-buku, literature dan artikel baik dari internet, Koran maupun sumber lain yang dianggap relevan dan pantas untuk dijadikan bahan acuan penulisan.

E. Kerangka pemikiran

Dalam memahami kasus sengketa wilayah Sabah ini, penulis menggunakan model pendekatan ilmiah. Model ini berfungsi untuk menganalisa tindakan/sikap dari pemerintah Malaysia dalam situasi krisis, dimana wilayah teritorialnya sedang mendapat ancaman dari pihak luar, yaitu kesultanan Sulu yang mengklaim bahwa Sabah adalah milik mereka. Penulis menggunakan kerangka berpikir dari pemikiran pemikiran K J Holsti untuk

membaca respon-respon Malaysia terhadap konflik. Yaitu model *interaksi Negara-negara : konflik dan resolusi konflik*.

Dalam buku K.J Holsti menggambarkan tentang interaksi antar Negara, bagaimana suatu Negara itu bertindak dan menjalin hubungan dengan beberapa Negara. Selain itu juga menguji hubungan konflik yang mengandung kemungkinan kekerasan atau penggunaanya yang terorganisasi. Konflik yang menimbulkan kekerasan yang terorganisasi muncul dari suatu kombinasi khusus para pihak, pandangan yang berlawanan mengenai suatu isu, sikap bermusuhan dan tipe-tipe tindakan diplomatic dan militer tertentu⁷. aktor dalam suatu konflik internasional, biasanya (tetapi tidak mutlak) adalah pemerintah Negara bangsa, para pihak berusaha mencapai tujuan tertentu dalam upaya untuk mencapai suatu tujuan tersebut, tuntutan atau tindakan mereka akan berjalan secara berlawanan dengan kepentingan dan tujuan pihak lainnya.⁸

Pada akhirnya konflik meliputi tindakan, ancaman dan hukuman yang bersifat diplomatik, propaganda, atau bahkan militer. Dengan demikian, sikap para pembuat kebijakan dapat mempengaruhi keputusan dalam membuat ancaman, melaksanakan hukuman dan tindakan yang diambil dalam menyikapi ancaman dari pihak luar.⁹ Terkait masalah sikap terhadap

⁷ Holsti, K.J., terjemahan M. Tahir Azhary, *Politik Internasional : Kerangka untuk analisa, edisi keempat jilid 2. Airlangga, 1988. Halaman 169.*

⁸ *Ibid*, hlm 170

⁹ *Ibid*, hlm 171

konflik, bahwa ada sikap dan kecenderungan untuk menggunakan kekerasan dalam usaha untuk mencapai atau mempertahankan tujuan kolektif.¹⁰ Dalam tulisan Holsti menyatakan, beberapa sikap yang diambil untuk memutuskan suatu langkah dalam situasi krisis .

Yang pertama *perasaan mendesak* yang menghantui para pembuat kebijakan setidak-tidaknya selama tahap krisis suatu konflik internasional. Mereka biasanya merasa bahwa hanya tersedia sedikit waktu untuk mengambil keputusan penting dan kemudian yakin bahwa keputusan dan tindakan yang diambil dengan cepat, sejumlah konsekuensi yang berbahaya, yang berasal dari tindakan permusuhan mungkin saja terjadi.¹¹ Contoh kasus pengambilan keputusan dalam *perasaan mendesak* adalah ketika terjadi krisis misil Kuba di Teluk Babi, yang menyeret dua kekuatan besar yaitu Uni Sovyet dan Amerika Serikat, dalam hitungan jam para pembuat kebijakan dituntut untuk membuat sebuah keputusan yang krusial terkait peluncuran rudal nuklir ke masing-masing target yang sudah ditetapkan. Pemerintah Uni Sovyet dan Amerika Serikat dengan keadaan terdesak dengan sisa waktu yang tidak banyak harus mengeluarkan keputusan yang sifatnya sangat darurat, dengan segala pertimbangan terhadap konsekuensi yang akan diterima kedua belah pihak maka keputusan yang diambil ketika itu adalah *win-win solution*,

¹⁰ *ibid*, hlm 175

¹¹ Robert. F. Kennedy, *Thirteen Days* (New York ; Norton, 1969) ; Charles F. Hermann , *crises in foreign policy making ; A Simulation of international politics* (China Lake, Calif ;Project Michelson report US Naval ordinance Test station, April 1965), p.29 . Ole R. Holsti, "The 1914 Case, "American Plitical science Review", 59 (1965), 370.

masing-masing dari mereka menarik diri dari pertempuran. Dalam kasus lain, yaitu konflik antara Pemerintah Malaysia dengan Kesultanan Sulu. Para pembuat kebijakan masing-masing pihak memang dituntut untuk bertindak cepat, dan memikirkan segala konsekuensi yang akan mereka terima akibat keputusan tersebut. Dan jika dilihat dari tingkat *urgensi*-nya, krisis misil kuba memang jauh lebih krusial dibanding sengketa wilayah di Sabah, akan tetapi masing-masing dari mereka pasti berusaha mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya mendesak agar situasi tidak bertambah buruk, dan juga sebagai tindakan preventif agar konflik tidak semakin meluas.

Kedua, tindakan atau sikap para pembuat kebijakan dalam situasi krisis diantara para pihak (Negara), sebagai sesuatu yang wajar karena ada pendapat umum yang menyatakan bahwa suatu perang bagaimanapun juga akan “memecahkan” masalah para pihak yang berselisih.¹²

Selanjutnya menyangkut tindakan yang bersifat kongkrit dari suatu Negara dalam menyikapi konflik. Menunjukan bahwa sejumlah studi membantu menjelaskan mengapa kekuatan militer sering merupakan tindakan yang paling sering diambil dalam suatu krisis. Meskipun tindakan lain dapat mendahului penggunaan kekuatan tersebut (militer). Pada tahap awal konflik atau krisis, protes, penolakan, penyangkalantuduhan, klaim, peringatan,

perundingan formal lebih mudah dalam tahap penyelesaian konflik atau krisis¹³. Bentuk-bentuk tindakan umum meliputi :

1. Nota Protes
2. Penyangkalan tuduhan
3. Ancaman “konsekuensi serius” jika tindakan lawan tidak segera di akhiri.
4. Blokade formal
5. Penggunaan kekuatan terbatas pembalasan
6. Gangguan atau penutupan perjalanan dan komunikasi diantara para warga Negara yang bermusuhan
7. Pemutusan resmi hubungan diplomatic
8. Perang, yang mungkin bervariasi menurut sifat tujuan, tingkat kekuatan, ruang lingkup geogravis
9. Dan lain-lain.

Yang bisa kita cermati dari tindakan diatas, bahwa suatu konflik atau krisis mungkin melibatkan salah satu tindakan tersebut dan banyak juga yang dilakukan secara bersama-sama. Hendaknya kita juga tidak mengasumsikan bahwa semua konflik dan krisis perlu “meningkat” dari satu langkah ke langkah yang berikutnya. Para pembuat kebijakan dapat

¹³ Charles A. McClelland, “Access to Berlin : The Quantity and Variety of events, 1948-1963, “ dalam *Quantitative International Politics*, ed. J. David Singer (New York : Free Press, 1968), pp. 159-86. Dikutip dari Holsti, K.J., terjemahan M. Tahir Azhary, *Politik Internasional : Kerangka untuk analisa, edisi keempat jilid 2. Airlangga, 1988. Hlm 177*

memutuskan untuk berpindah dari pengaduan dan peringatan kepada penggunaan *kekuatan militer* dan bukan meneruskan langkah demilangkah menuju perang.¹⁴

Hasil yang mungkin timbul dari konflik internasional, adalah untuk mengartikan setiap macam hasil akhir konflik terlepas dari bagaimana hasil itu dicapai. Oleh karena itu, suatu konflik "dapat diselesaikan" melalui penaklukan-tanpa "diplomasi" kecuali mungkin dalam menyusun konsep syarat-syarat penyerahan atau konflik dapat diatasi melalui suatu kompromi resmi tertentu yang diajukan setelah perundingan mediasi. Akan tetapi suatu kompromi hanya merupakan satu dari sekurang-kurangnya enam hasil penyelesaian yang mungkin dicapai. Berikut adalah beberapa penyelesaian yang mungkin dicapai (Kenneth E. Boulding, 1962).¹⁵

1. Penghindaran diri

Bila ketidaksesuaian sasaran, nilai, kepentingan, atau pandangan dirasakan oleh kedua belah pihak, satu kemungkinan pemecahan masalah bagi satu atau kedua pihak adalah menarik diri dari suatu posisi fisik atau berunding atau menghentikan tindakan yang pada mulanya menyebabkan tanggapan yang bermusuhan. Misalnya suatu

¹⁴ *Op. cit.* Holsti K.J., hlm 177-178

¹⁵ Boulding, Kenneth E; *Conflict and Defense* (New York : Harper & Row, 1962. Dikutip dari buku Holsti, K.J., terjemahan M. Tahir Azhary, *Politik Internasional : Kerangka untuk analisa, edisi keempat jilid 2. Airlangga, 1988.* hlm 180

pemerintah memprakarsai suatu usulan dengan Negara tetangga untuk melakukan penyesuaian perbatasan tertentu demi kepentingannya dan Negara tetangga menolak, dengan alasan status quo harus dipertahankan, pihak yang mengajukan tuntutan itu mungkin, dengan tidak mengharapkan kondisi semakin buruk, maka menarik kembali permintaan atas tuntutannya tersebut.

2. Penaklukan

Mengharuskan membanjiri lawan dengan menggunakan kekuatan. Bahkan, terminasi penaklukan kejam melibatkan suatu perjanjian perundingan tertentu diantara kedua pihak yang bermusuhan. Coser menulis dalam jurnalnya, bahwa harus disadarkan bahwa perdamaian, bahkan dengan istilah penyerahan tanpa syarat, lebih dikhendaki daripada kelangsungan konflik.¹⁶ Kesadaran ini hanya dapat muncul setelah satu pihak mencapai konfrontasi militer secara simbolik.

3. Penundukan atau penangkalan

Ukuran yang digunakan untuk membedakan penundukan atau penangkalan adalah apakah ancaman untuk menggunakan kekuatan dilaksanakan atau tidak. Dalam penundukan atau penangkalan, satu pihak menarik diri dari suatu nilai, posisi, atau kepentingan yang dipertahankan sebelumnya karena lawan membuat ancaman yang

¹⁶ Coser, Lewis A; "The Termination of Conflict," *Journal of conflict Resolution*, 5 (1961), 349. Dikutip

efektif untuk “mendorong” nya keluar dengan menggunakan kekuatan (dalam suatu penarikan diri suka rela tentu tidak dibuat ancaman demikian). Meskipun tidak mungkin terjadi kekerasan, kita dapat menganggap suatu penundukan atau penangkalan dari ancaman militer sebagai suatu cara penyelesaian konflik yang tidak bersifat perdamaian. Dan menunjukkan kepada pihak lain, bahwa resiko kerugian yang mungkin timbul dari meneruskan tindakan-tindakanya atau dari mempertahankan kedudukanya itu jauh lebih banyak daripada kerugian akibat mundur atau menarik diri.

4. Kompromi

Hasil keempat suatu konflik atau krisis internasional adalah kompromi tertentu dimana kedua pihak menyetujui menarik kembali sebagian tujuan atau tuntutan, klaim, kedudukan, atau tindakan permulaanya.¹⁷ Masalah utama dalam kompromi adalah membuat kedua belah pihak sadar bahwa harga konflik yang berlanjut lebih mahal daripada biaya dan konsekuensi pengurangan klaim atau penarikan diri dari suatu posisi diplomatic atau militer.

5. Imbalan

Hasil rumit yang didasarkan pada suatu kompromi sebelumnya adalah imbalan. Dimana lawan menyetujui suatu penyelesaian yang dicapai

¹⁷ Boulding; Conflict and Defence, pp. 309-10. Dikutip buku Holsti, K.J. , terjemahan M. Tahir Azhary,

melalui prosedur non-perundingan. Suatu imbalan merupakan keputusan mengikat yang diadakan oleh pihak ketiga yang netral yang menetapkan syarat-syarat substantive penyelesaian itu. Akan tetapi proses penyelesaian melalui imbalan, tidak perlu dibuat melalui proses pengadilan, selama criteria ekstern dan netral untuk penyelesaian diterima oleh kedua belah pihak. Hasilnya dapat diterima sebagai suatu imbalan, meskipun diambil oleh lembaga non peradilan.

6. Penyelesaian pasif

Sering sekali sebuah konflik internasional tidak mempunyai hasil formal (penangkalan, penghindaran, kompromi, penaklukan atau imbalan), tetapi bertahan selama jangka waktu yang lama sampai para pihak secara tegas menerima secara tegas *status quo* yang baru sebagai sesuatu yg absah. Quincy Wright juga telah mengemukakan bahwa kebanyakan konflik berakhir karenamenjadi using.¹⁸

Konsep Represif dan Diplomasi

- Represif

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Represif berarti bersifat represi (menekan, mengekang, menahan, atau menindas).¹⁹

¹⁸ Wreight, "A Study of War", pp. 1256-57. Dikutip dari buku Holsti, K.J. , terjemahan M. Tahir Azhary, *Politik Internasional : Kerangka untuk analisa, edisi keempat jilid 2. Airlangga, 1988.hlm 183.*

¹⁹ Dikutip dari sumber <http://www.kemahasiswaan.com/2006/>

Jadi represif merupakan suatu aktifitas atau tindakan dari seseorang atau kelompok yang menggunakan cara-cara seperti diatas.

Berbicara masalah dampak militer terhadap politik domestic, mempunyai pergerakan secara umum dalam dua arah. Arah yang pertama adalah *concern* dengan intervensi militer, khususnya yang berkaitan dengan terjadinya kudeta dan pembangunan politik. Arah lain, fokus utama pada studi masa sekarang, adalah yang bersangkutan dengan dampak militer selama menggunakan tekanan politik atau *political repressive*. Military –Coercion perspective (MCP) fokus pada militer sebagai organisasi yang spesialisasinya dalam menggunakan kekerasan dan berpartisipasi secara aktif dalam penerapan “*repression*” sesuai dengan wilayah hukumnya.²⁰

Hubungan antara militer sebagai alat untuk melakukan tindakan represif adalah “*sheer military influence increase the application of political repression*”, atau pengaruh militer semata-mata hanya untuk meningkatkan penerapan represi politik. Dalam kasus ini, pengaruh militer diharapkan dapat memajukan perilaku repressif diluar kebiasaan.²¹

Tindakan represif yang dilancarkan Militer Malaysia merupakan sebuah tindak lanjut dari di abaikanya upaya damai yang

²⁰ Daventport, Christian. “ASSESSING THE MILITARY’S INFLUENCE ON POLITICAL REPRESSION”,
University of Houston, Journal of Political and Military Studies, Vol. 10, No. 1, 2007, pp. 1-10.

ditawarkan Pemerintah Malaysia kepada Sultan Sulu. Pemerintah Malaysia lewat Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Zulkifeli Mohd. Zin. Menerjukkan setidaknya 3500 pasukan yang terdiri dari gabungan Angkatan Militer Malaysia dengan Polis Diraja Malaysia, selain itu peralatan pendukung lain seperti kendaraan lapis baja, senjata api, helikopter dan pesawat tempur Super Hornet F-18, serta kapal perang untuk melakukan patroli di sepanjang pesisir Sabah.

Dengan kekuatan sebanyak itu tentu tidak sebanding dengan jumlah pasukan gerilyawan SLA atau pasukan pembebasan Sabah dari Kesultanan Sulu yang hanya berjumlah tidak lebih dari 300 pasukan. Jadi kalau dikalkulasi secara matematika perbandingannya adalah 1: 10, yaitu seorang pejuang Sulu akan di *cover* oleh 10 tentara Malaysia dengan persenjataan yang jauh lebih modern. Jadi sebenarnya peta kekuatan diantara keduanya sangat tidak seimbang, Militer Malaysia hanya mengalami kendala pada pergerakan gerilya yang dilakukan para penyusup, mereka tersebar di berbagai desa dan bahkan ada yang menyamar sebagai warga desa di Sabah. Tentara Malaysia juga cukup kesulitan dalam mencari para penyusup, karena kondisi geografis Sabah yang banyak terdapat hutan dan kebun sawit memudahkan untuk menjadi medan gerilya. Oleh sebab itu proses pencarian para penyusup memakan waktu sedikitnya 2 minggu lamanya, waktu yang sebenarnya terlalu lama untuk menumpas kekuatan gerilya ini.

- **Diplomasi**

Merupakan "*the art of negotiation, especially o treaties between states; political skill*". Pada dasarnya kegiatan diplomasi tidak bisa dilepaskan dari negosiasi, diplomasi merupakan instrument dari politik luar negeri suatu Negara, sedangkan negosiasi adalah alat suatu Negara dalam menjalankan diplomasi . *Ivo D. Duchachek* berpendapat, "Diplomasi biasanya didefinisikan sebagai praktek pelaksanaan politik luar negeri suatu negara dengan cara negosiasi dengan negara lain", akan tetapi diplomasi kadang-kadang dihubungkan dengan perang. Oleh karena itulah *Clausewitz*, seorang filolsof Jerman, dalam pernyataannya yang terkenal mengatakan bahwa "perang merupakan kelanjutan diplomasi melalui sarana lain".²²

Menurut Hans J. Morgenthau tugas diplomasi dapat dibagi dalam empat pokok:

1. Diplomasi harus membentuk tujuan dalam rangka kekuatan yang sebenarnya untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu negara yang ingin menciptakan tujuan-tujuannya yang belum dicapai haruslah berhadapan dengan suatu risiko untuk perang. Karena itu diperlukan suksesnya diplomasi untuk mencoba mendapatkan tujuannya tersebut sesuai dengan kekuatannya.

²² Fatoni, Ahmad. "Hubungan antara Lobi, Diplomasi dan Negosiasi terhadap Komunikasi", ditulis 15 Desember 2012. Sumber <http://ahmadfatoniofficial.wordpress.com/2012/12/15/hubungan-antara->

2. Di samping melakukan penilaian tentang tujuan-tujuannya dan kekuatannya sendiri, diplomasi juga harus mengadakan penilaian tujuan dan kekuatan dari negara-negara lainnya. Didalam hal ini, sesuatu negara haruslah menghadapi resiko akan terjadinya peperangan, apabila diplomasi yang dilakukannya itu salah dalam menilai mengenai tujuan dan kekuatan negara-negara lainnya.
3. Diplomasi haruslah menentukan dalam hal apa perbedaan dalam tujuan-tujuan itu dapat cocok satu sama lain. Diplomasi harus dilihat apakah kepentingan negaranya sendiri dengan negara lain cocok. Jika jawabannya “tidak”, maka harus dicari jalan keluar untuk merujukkan kepentingan-kepentingan tersebut.
4. Diplomasi harus menggunakan cara-cara yang pantas dan sesuai seperti kompromi, bujukan dan bahkan kadang-kadang ancaman kekerasan untuk mencapai tujuan-tujuannya.²³

F. Hipotesa

Setelah mengkaji latar belakang permasalahan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan sementara mengenai respon dari Pemerintah Malaysia terhadap aksi klaim wilayah Sabah oleh Kesultanan Sulu.

Yang pertama dilihat dari perspektif dalam negeri, bahwa Pemerintah Malaysia menggunakan tindakan represif dengan mengerahkan kekuatan

militernya untuk berusaha mengintervensi para pejuang SLA (Sabah Liberal Army) agar meninggalkan Sabah.

Kedua dilihat dari perspektif hubungan luar negeri, antara Pemerintah Malaysia dengan Pemerintah Filipina. Pemerintah Malaysia memilih jalur diplomasi kepada Pemerintah Filipina dengan melakukan negosiasi secara intensif, agar Pemerintah Filipina ikut andil dalam proses resolusi konflik di Sabah yang melibatkan Warganya.

G. Jangkauan Penelitian

Pembatasan dalam penelitian dilakukan agar objek penelitian menjadi lebih jelas dan spesifik, selain itu agar permasalahan dan kajian dapat melebur serta wacana yang telah ditetapkan sebagai bahan kajian tidak terjadi penyimpangan. Batas-batas dari kajian itu akan mencegah timbulnya kekaburan dan kerancuan wilayah yang sedang dibahas. Adapun jangkauan penelitian dalam karya tulis ini adalah konflik yang terjadi di wilayah Sabah, antara Pemerintah Malaysia dan Kesultanan Sulu, Filipina. Yang terjadi pada tanggal 12 Februari 2013 sampai akhir Maret 2013. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan penulis juga akan menengok peristiwa-peristiwa sebelumnya diluar masa tersebut yang berfungsi untuk mendukung dan

H. Sistematika Penulisan

BAB I

Pada bab pertama ini akan di jelaskan dan diuraikan mengenai bagian-bagian yang menjadi dasar penulisan skripsi. Bab ini berisi latar belakang permasalahan dan rumusan masalah. Serta dipaparkan juga mengenai hipotesa, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II

Memaparkan tentang kondisi wilayah Sabah dilihat dari kondisi sejarah, sosial, politik, ekonomi, politik dan kondisi geografis.

BAB III

Menjelaskan tentang sejarah, akar permasalahan yang terjadi dan melihat bagaimana proses eskalasi konflik yang terjadi dari awal mula sampai yang terkini.

BAB IV

Menjawab pokok permasalahan "Bagaimana respon pemerintah Malaysia terhadap aksi klaim wilayah Sabah Oleh Kesultanan Sulu. Membahas tentang sikap dan tindakan yang diambil oleh pemerintah Malaysia terhadap Kesultanan Sulu dalam situasi krisis Sabah

Bab V

Membahas tentang kesimpulan umum dan saran